



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SALIM**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **454619**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.117.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/36 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah Seluas 1325 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 9686 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 82.000.000
4. Tanah Seluas 6721 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 12399 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 7562 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 70.000.000
7. Tanah Seluas 458 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 15.000.000
8. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
9. Tanah Seluas 917 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 20.000.000
10. Tanah Seluas 11432 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 80.000.000
11. Tanah Seluas 6865 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 35.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA



REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

13. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI

Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **195.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G Tahun 2008, HASIL SENDIRI

Rp. 170.000.000

2. MOTOR, HONDA HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **18.700.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **1.330.700.000****III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.330.700.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.